



Agus Rela Antre

Demi SKTM

■ Tak Cukup KMS untuk Mendaftar SMA/SMK



TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI

PERSIAPAN MENDAFTAR SEKOLAH - Sejumlah orangtua dan anak antre untuk mengurus Penambahan Nilai di kantor Disdikpora DIY, Selasa (20/6). Orangtua mulai mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu dan penambahan nilai dari berbagai prestasi untuk persiapan mendaftar sekolah.

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah orangtua siswa pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) di Kota Yogyakarta terpaksa harus mengantre untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Yogyakarta. Hal ini untuk melengkapi data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK yang tahun ini dikelola Pemerintah Provinsi DIY.

Para orangtua tersebut mengaku sempat bingung lantaran bermodalkan KMS saja tidak cukup untuk mendaftar PPDB SMA/SMK. Para orangtua pun harus melengkapi SKTM agar anaknya bisa mendapatkan kuota untuk masuk di sekolah negeri.

● ke halaman 14

Agus Rela Antre

● Sambungan Hal 13

Antrean panjang pun terlihat di kantor Dinsos setempat sejak beberapa hari terakhir. "Untuk tahun ini, kami harus meminta SKTM dari Dinas Sosial. Tadi sempat bingung juga saat hanya bawa KMS tapi enggak bisa langsung daftar," ujar Agus Janarko (50), satu warga Kraton, Yogyakarta, Selasa (20/6).

Dia pun kaget "kartu sakti" dari Pemkot untuk warga kurang mampu itu pun belum cukup untuk dipergu-

nakan mendaftarkan putrinya ke sekolah negeri. Jika tahun lalu, kata Agus, dirinya cukup mengumpulkan fotokopi KMS saja ke Disdikpora DIY.

Untuk bisa mendapatkan SKTM dari Dinsos, dirinya diwajibkan mengumpulkan fotokopi KMS dan fotokopi kartu keluarga. Usai mendapatkan SKTM, Agus segera menuju ke kantor Disdikpora DIY untuk meminta pengesahan agar putrinya bisa mendaftar melalui jalur siswa tidak mampu.

Haryono, warga Gedong-

kuning juga mengaku tidak tahu jika persyaratan mendaftar PPDB juga harus dilengkapi dengan SKTM. Padahal, dirinya sudah melampirkan KMS yang dikeluarkan Pemkot setempat.

Dia mengaku diminta oleh petugas di Disdikpora DIY untuk mengurus SKTM terlebih dahulu ke Dinsos Kota Yogyakarta. Padahal dia sudah melampirkan KMS. "Untungnya masih ada waktu sampai 30 Juni besok," jelasnya.

100 pemohon

Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Hadi Mochtar

menjelaskan, selama tiga hari terakhir terjadi antrian warga pemegang KMS untuk mendapatkan SKTM. Dia menjelaskan, dalam sehari ada sekitar 100 pemohon yang telah memegang KMS mendatangi kantornya untuk meminta SKTM.

"Antara KMS dengan SKTM sebetulnya tidak berbeda. Sehingga, warga yang hendak mencari SKTM cukup menunjukkan KMS yang dimiliki. Namun, kalau memang tidak bisa menggunakan KMS dan harus SKTM, kami tetap melayani warga," tegasnya. (ais)

Pemkot Tetap Beri Bantuan

KEPALA Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana* menguraikan, pihaknya sudah tidak memiliki kewenangan pada proses PPDB jenjang SMA/SMK.

Namun demikian, siswa miskin di Kota Yogyakarta yang melanjutkan ke jenjang tersebut tetap akan dibantu oleh Pemkot untuk biaya personal maupun operasional sekolah.

"Besarnya jenjang SMA ialah Rp4 juta per tahun, dan SMK Rp4,5 juta per tahun," jelasnya.

Proses verifikasi calon siswa PPDB miskin SMA sederajat dibuka sejak Senin 19 Juni hingga Kamis 24 Juni 2017. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005